

# BAB I

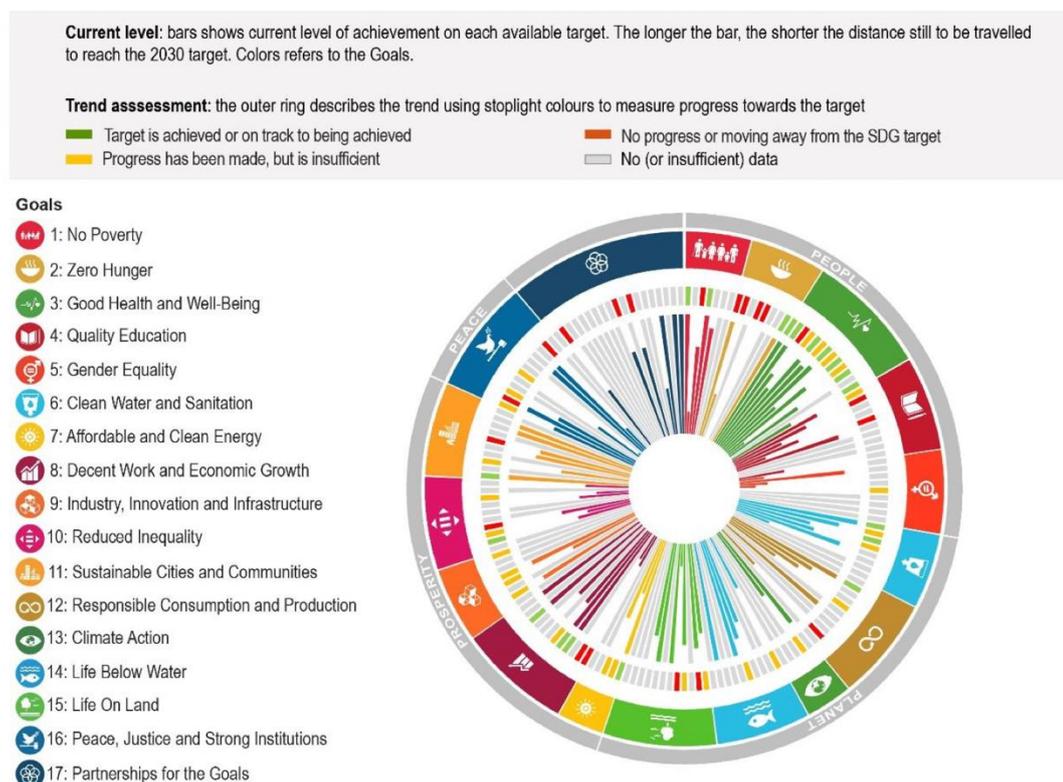
## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) merupakan program lanjutan dari MDG's atau Millenium Development Goals yang semula hanya mencakup 8 target menjadi 17 target dan 169 sasaran. Program SDGs ini merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan yang dimulai sejak tahun 2015 dan diharapkan tercapai pada tahun 2030. Program SDGs bertujuan untuk mengatasi tantangan tambahan seperti kesetaraan, urbanisasi, kelestarian alam dan memiliki tujuan memperkuat kemitraan global. Hal ini berdasarkan 5 prinsip dasar yang memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yaitu *people* (manusia), *planet* (bumi), *prosperity* (kemakmuran), *peace* (kedamaian) dan *partnership* (kerjasama) (Panuluh & Fitri, 2016). "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*" telah diadopsi secara aklamasi oleh 193 negara anggota PBB yang hadir dalam pengesahan dokumen SDGs di markas PBB di New York, Amerika Serikat.

Jepang merupakan salah satu negara yang juga ikut mengadopsi agenda SDGs. Pada Mei 2016, pemerintah Jepang mendirikan "Markas Promosi SDGs" yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Hal ini guna mencapai SDGs secara efektif dan memastikan pendekatan kepada seluruh pemerintah dan bertujuan untuk memimpin implementasi SDGs baik di dalam negeri maupun internasional. Di tahun 2022, Jepang berada dalam peringkat 21 dari 193 negara anggota PBB dengan skor 79.41/100 untuk keberhasilan SDGs (SDG Index, 2023). Jepang telah mencapai 27

dari 125 target SDGs dan diperkirakan akan memenuhi 6 target tambahan pada tahun 2030. Berdasarkan *Voluntary National Review (VNR)*, persentase pemerintah daerah di tahun 2017 yang menjalankan SDGs hanya sebanyak 1%, namun pada tahun 2020 persentase tersebut naik menjadi 39,74%, dan diharapkan pada akhir tahun 2024 mencapai 60% (Gemba, 2022). Meskipun demikian, masih ada tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh Jepang untuk meningkatkan persentase keberhasilan SDGs nya. Salah satunya adalah mengenai kesetaraan gender. Mengatasi peluang yang tidak setara bagi kelompok minoritas dan perempuan memerlukan upaya lebih lanjut.

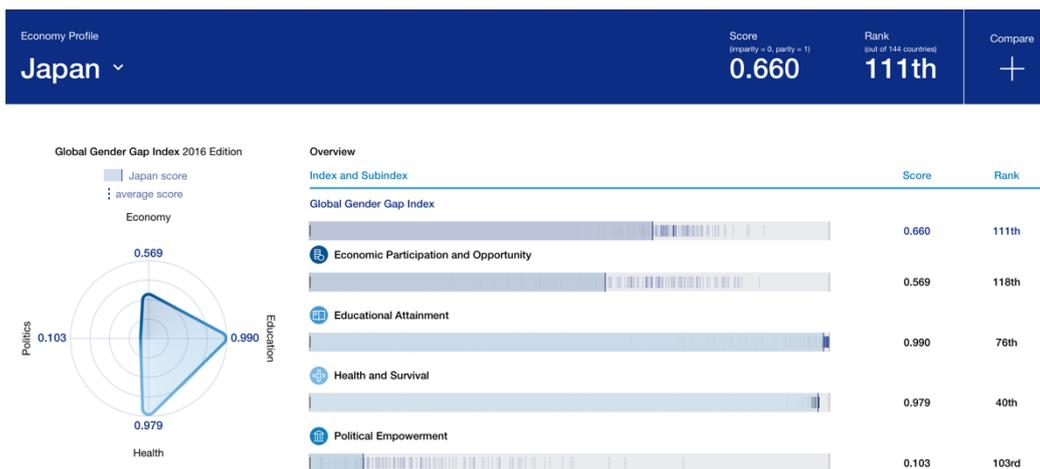


**Gambar 1. 1** Pencapaian Jepang terhadap SDGs  
 Sumber: *www.oecd.org*

Jepang memiliki tingkat kesetaraan gender yang tergolong rendah. Berdasarkan data dari World Economy Forum, Jepang berada di peringkat 123 dari 146 negara. Sebagai negara yang ikut berkontribusi dalam mewujudkan SDGs, Jepang

tentu harus lebih serius dalam menurunkan angka kesetaraan gendernya karena kesetaraan gender dianggap penting sebagai prinsip untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan keadilan bagi semua orang di dunia (Global Union, 2023).

Hal ini terjadi karena Jepang merupakan salah satu negara maju yang masih menerapkan sistem patriarki dalam berbagai sektor kehidupan. Meskipun telah melakukan pembangunan dan modernisasi sejak 1866 atau sering dikenal dengan Restorasi Meiji, Jepang masih memiliki tingkat kesenjangan gender yang tergolong tinggi. Di Jepang sendiri, sulit bagi perempuan yang hamil atau telah memiliki anak untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, 70% perempuan Jepang memilih untuk meninggalkan pekerjaannya setelah melahirkan anak pertama (Haworth, 2013). Hal ini tidak jauh dari pandangan bahwa peran perempuan hanya sebatas sebagai ibu rumah tangga, merawat anak, dan mengatur finansial keluarga. Hal ini berkaitan erat dengan budaya Jepang yang telah diwariskan secara turun temurun



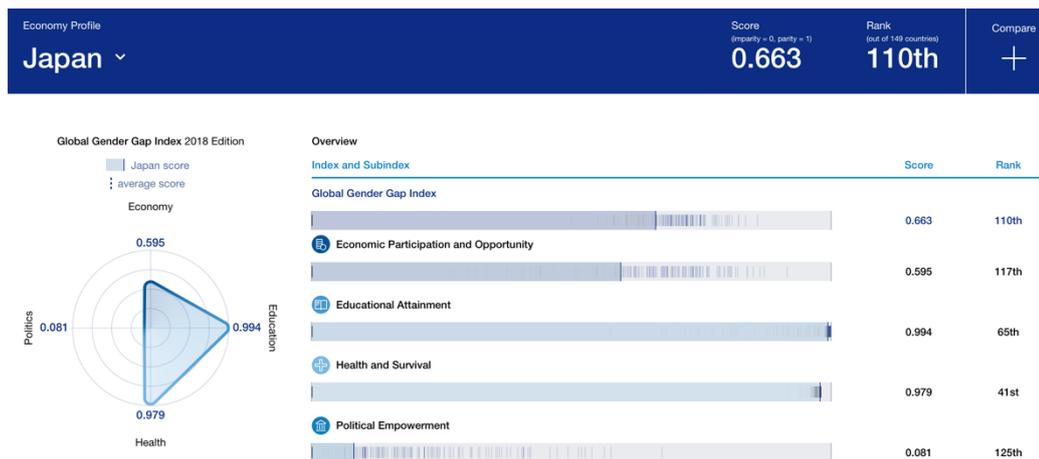
**Gambar 1. 2** Gender Gap Index Jepang 2016  
 Sumber: (World Economic Forum, 2016)



**Gambar 1. 3** Gender Gap Index Jepang 2017

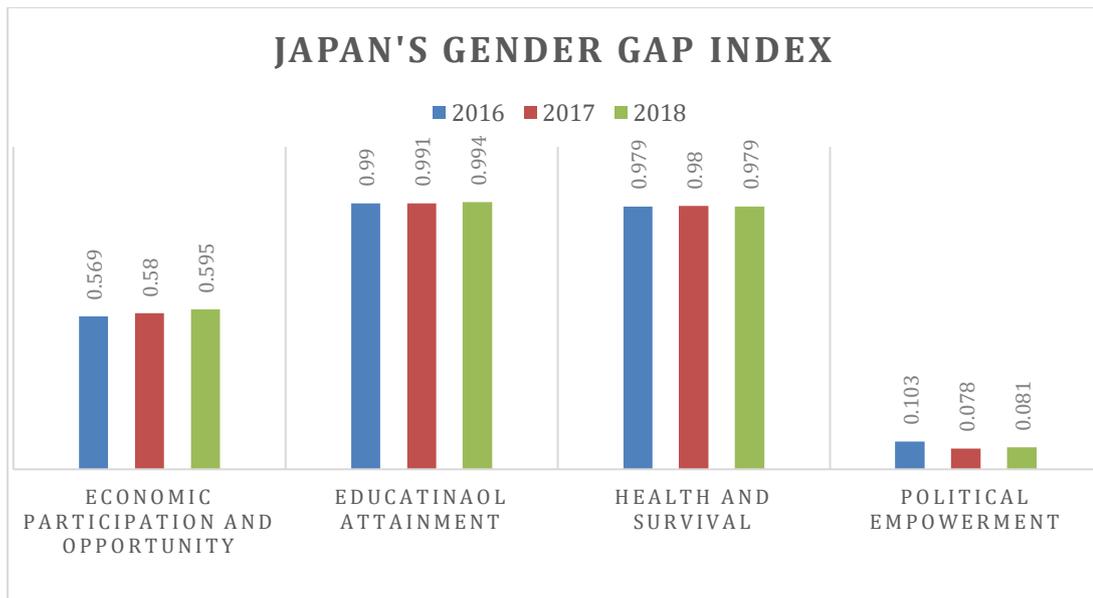
Sumber: (World Economic Forum, 2017)

Berdasarkan laporan dari World Economic Forum, posisi Jepang dalam kesetaraan gender turun dari peringkat 111 dari 144 negara pada tahun 2016 menjadi peringkat 114 dari 144 negara pada tahun 2017. Di tahun 2018 peringkat Jepang berhasil naik empat tingkat menjadi ranking 110 dari 144 negara. Hal ini tentu menjadi sebuah pencapaian yang baik bagi Jepang untuk membuktikan keseriusannya dalam meningkatkan angka kesetaraan gender di negaranya.



**Gambar 1. 4** Gender Gap Index Jepang 2018

Sumber: (World Economic Forum, 2018)



**Gambar 1. 5** Perbandingan Gender Gap Index Jepang Tahun 2016-2018  
 Sumber: diolah oleh penulis

Disparitas utama dalam kesenjangan gender di Jepang mencakup hal-hal berikut: rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, kesenjangan upah yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan, termasuk untuk pekerjaan serupa, hingga rendahnya perwakilan perempuan pada posisi-posisi tingkat tinggi (Avery & Nelson, 2014).

Kesetaraan gender memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Peran tersebut adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua perempuan dan anak perempuan, yang berarti setiap perempuan memiliki hak untuk berdaya membangun dirinya sendiri (Amirudin, 2020). Kesetaraan gender berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi karena perempuan yang memiliki pendapatan dapat menopang kehidupan mereka sendiri dan keluarga mereka dengan meningkatkan kegiatan konsumsinya yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Amirudin, 2020). Kesenjangan yang tinggi antara laki-laki dan perempuan dalam partisipasi ekonomi merupakan alasan penting lainnya mengapa peringkat Jepang lebih buruk dalam

kesenjangan gender dibandingkan dengan negara-negara industri lainnya. Rendahnya skor tersebut terutama disebabkan oleh sedikitnya jumlah anggota parlemen perempuan serta rendahnya rasio perempuan dalam posisi manajerial. Namun, populasi Jepang yang kian tahun kian menyusut membuat perempuan dianjurkan untuk menikah dan memiliki anak (O'Neill, 2023). Penurunan populasi ini kemudian mempengaruhi kehidupan masyarakat Jepang untuk generasi berikutnya. Dengan penurunan populasi, Jepang menjadi kekurangan tenaga kerja karena usia produktif yang rendah. Maka dari itu, Perdana Menteri Shinzo Abe berupaya untuk menaikkan angka kesetaraan gender di Jepang dengan berbagai cara.

Adapun beberapa penelitian terdahulu membantu penulis memahami konsep dan studi kasus yang akan digunakan dalam penelitian ini. Jurnal berjudul Pengarusutamaan Gender Di Jepang Untuk Mencapai SDGs (Sustainable Development Goals) Dalam Perspektif Feminisme Liberal membahas mengenai proses pengarusutamaan gender di Jepang melalui program atau kebijakan pemerintah. Jurnal ini membantu penulis dalam melihat kondisi kesetaraan gender di Jepang serta hambatannya dalam meningkatkan kesetaraan gender.

Jurnal kedua berjudul *Gender inequality in Japan: The status of women, and their promotion in the workplace* yang menganalisis mengenai alasan tingginya tingkat kesenjangan di Jepang, yang diasumsikan berakar kuat pada norma-norma sosial. Jurnal ini membantu penulis memahami budaya Jepang dalam melihat kondisi status wanita Jepang dalam lingkungan pekerjaan.

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, penulis menemukan celah penelitian yakni belum adanya keterkaitan antara gender equality serta SDGs. Maka dari itu,

penulis dalam penelitian ini akan membahas upaya Jepang dalam meningkatkan kesetaraan gender sesuai prinsip SDGs.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana upaya Jepang dalam meningkatkan kesetaraan gender sesuai dengan prinsip SDGs?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk melengkapi persyaratan penulis dalam mendapatkan gelar S1 Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu penulis ingin mengetahui analisis upaya Jepang dalam meningkatkan kesetaraan gender yang sesuai dengan prinsip SDGs.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Gender Inequality**

Kultur yang dimiliki oleh masyarakat selama ini masih menganggap bahwa gender dan seks adalah hal yang sama. Oleh karena itu struktur sosial menempatkan perempuan secara tidak adil terhadap laki-laki karena mereka dianggap sebagai bagian dari laki-laki dan harus dikontrol, diawasi, dan dilindungi oleh laki-laki. Istilah seks digunakan untuk merujuk pada sifat biologis perempuan dan laki-laki, dan istilah

gender merujuk pada ekspektasi dan peran yang terkait dengan maskulinitas dan feminitas yang dimediasi oleh budaya (Lips, 2014). Elaine Showalter juga ikut mendefinisikan gender sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya (Showalter, 1989). Pemisahan gender menyebabkan seseorang kesulitan untuk bertindak, berperilaku, dan bersaing secara sehat untuk sukses di bidang dan bakatnya masing-masing.

Pemahaman tentang ketidaksetaraan gender didasarkan pada tradisi masyarakat tentang ketidaksamaan peran dan wewenang antara laki-laki dan perempuan (Anggraini, Tarma, & Mulyati, 2020). Ketidakadilan gender dapat disebabkan oleh lingkungan sosial dimana seseorang tinggal. Pendapat tersebut didukung oleh Annisa (2018) bahwa gender dapat dibentuk oleh tempat seseorang berada dan bagaimana lingkungannya mempengaruhinya (Siregar, 2018). Pendapat ini menunjukkan bahwa ada perbedaan pemikiran tentang cara laki-laki dan perempuan melihat dunia di dalam masyarakat. Pendapat ini juga menekankan betapa pentingnya lingkungan dalam membangun pemahaman tentang perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan (Siregar, 2018).

Natasya (2013) menyatakan bahwa terdapat lima faktor penyebab ketidaksetaraan gender, yakni subordinasi, marginalisasi, beban ganda (*double burden*), kekerasan (*violence*) dan stereotipe (Natasya, 2013). Subordinasi adalah keyakinan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama daripada jenis kelamin lainnya, dan ini menyebabkan anak perempuan ditempatkan di posisi yang lebih rendah di hampir semua bidang. Marginalisasi adalah keadaan ketika perempuan terpinggirkan, terutama terjadi di bidang ekonomi. Keadaan ini terjadi dimana perempuan dianggap bukan tulang punggung keluarga, sehingga mereka

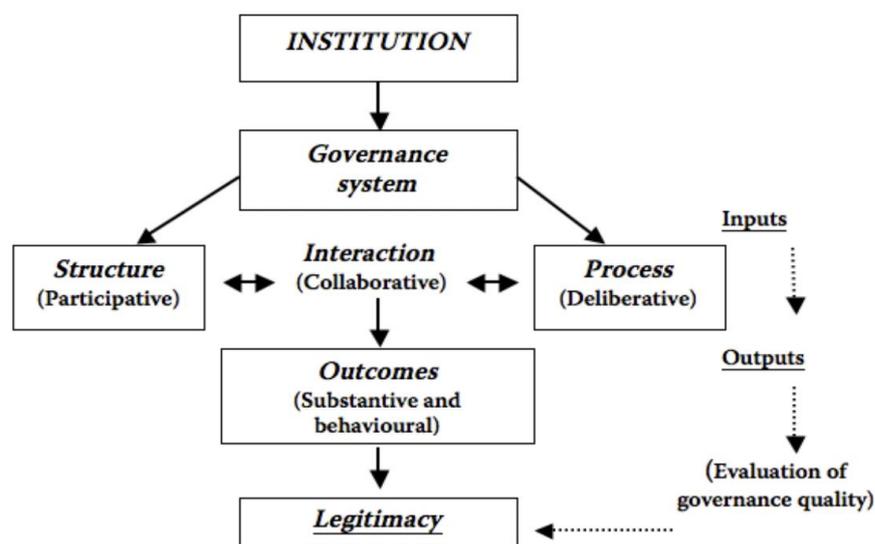
mendapatkan pendapatan yang lebih rendah dan melakukan pekerjaan yang bersifat rutinitas. Beban ganda adalah keadaan dimana perempuan yang bekerja di bidang profesional tidak hanya mengawasi pekerjaan rumah tangga mereka tetapi juga harus mempertimbangkan pekerjaan karir mereka. Kekerasan adalah tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk menyebabkan penderitaan baik secara fisik maupun non-fisik. Stereotipe tentang perempuan biasanya digambarkan sebagai sesuatu yang negatif, seperti lemah, penakut, cengeng, dan sebagainya. Ini membedakan mereka dari anak laki-laki, yang digambarkan sebagai seseorang yang kuat dan pemberani.

Permasalahan gender merupakan isu global yang melampaui batas negara, budaya, dan sistem politik. Ketidaksetaraan gender berdampak tidak hanya bagi individu tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan sebuah tata kelola global yang melibatkan negara, organisasi multilateral, sektor swasta, hingga masyarakat sipil. Tata kelola ini sangat berperan dalam menetapkan standar, kebijakan, dan komitmen lintas negara untuk mengatasi kesenjangan gender dalam hal akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan partisipasi politik. Upaya untuk mencapai keadilan gender akan gagal dan tidak merata jika tidak ada pendekatan kolektif dan terorganisir.

#### **1.4.2 Konsep Global Governance**

Menurut Benedict, *global governance* adalah tatanan yang muncul dari institusi, proses, norma, perjanjian formal, dan mekanisme informal yang mengatur tindakan demi kebaikan bersama (Benedict, 2001). Tata kelola global mencakup aktivitas di tingkat internasional, transnasional, dan regional, serta mengacu pada

aktivitas di sektor publik dan swasta yang melampaui batas-batas negara (Benedict, 2001). Menurut Cadman, global governance merupakan sebagian ‘interaksi dinamis’ antara aktor negara dan non-negara (Cadman T. , 2012) . Interaksi ini dilakukan oleh masyarakat sipil, dunia usaha, dan sektor publik. Dalam hal ini, aktor negara dan non negara melakukan serangkaian pengaturan bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Tata kelola juga dianggap sebagai sistem koordinasi, pengarahan, dan/atau pengendalian pada tingkat spasial yang berbeda. Secara keseluruhan, pengaturan tata kelola global terdiri dari akuntabilitas, perubahan perilaku, konsultasi, pengambilan keputusan, partisipasi, penyelesaian masalah, sumber daya, dan transparansi (Cadman T. , 2012). Partisipasi merupakan elemen penting yang muncul dari kekuatan masyarakat dan pemerintah sebagai peserta demokratis atau pengambil keputusan dalam pertemuan forum antar pemerintah.



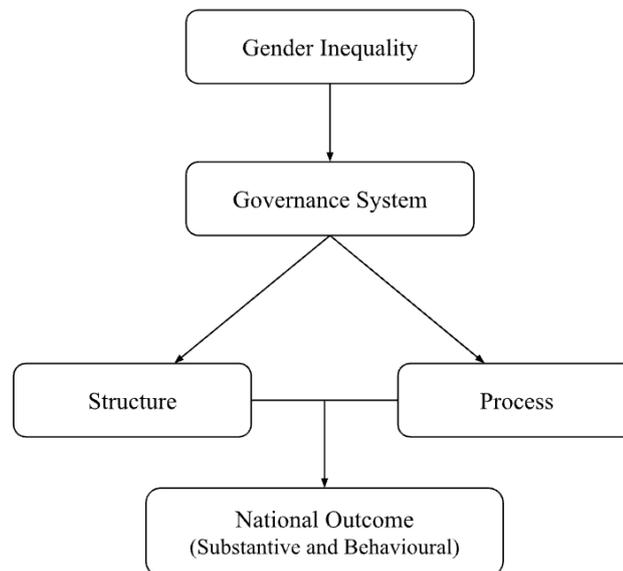
**Gambar 1. 6** Model Konseptual Sistem Tata Kelola Global  
 Sumber: (Cadman & Maraseni, 2012)

Hal ini mengembangkan kerangka analitis yang mengintegrasikan pengaturan tata kelola ke dalam dua sistem tata kelola: struktur dan proses (Cadman T. , 2012).

Tata kelola struktural telah diidentifikasi sebagai model yang digunakan di berbagai institusi yang berfokus pada partisipasi aktor terkait (Cadman & Maraseni, 2012). Tata kelola proses, di sisi lain, mengacu pada gagasan pengarahan dan koordinasi terkait pengambilan keputusan dan implementasi (Cadman & Maraseni, 2012). Interaksi tata kelola struktural dan proses yang bersifat kolaboratif mempunyai hasil substantif berupa pengembangan norma dan penetapan standar serta perubahan perilaku (Cadman T. , 2012). Oleh karena itu, ciri inti tata kelola adalah struktur sebagai proses dan proses sebagai pertimbangan (Cadman & Maraseni, 2012). Model normatif Cadman menekankan bahwa keberhasilan sebuah lembaga pemerintah sangat ditentukan oleh integrasi komponen struktural dan komponen prosedural yang berpengaruh untuk mencapai hasil yang optimal untuk kemudian akan diperiksa efektivitas dan legitimasinya melalui evaluasi tata kelola tersebut.

Contoh dari penerapan konsep global governance ke dalam dunia nyata adalah Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dana Moneter Internasional (IMF) (Bainus & Rachman, 2022). Ketimpangan gender merupakan tantangan lintas batas yang tidak bisa diselesaikan secara terpisah oleh masing-masing negara. Isu ini membutuhkan legitimasi internasional dan kerangka global yang terintegrasi. SDGs menjadi bagian dari salah satu tata kelola global dalam isu gender. Hal ini karena SDGs sebagai upaya bersama untuk mengatasi permasalahan kolektif negara-negara yang ada di dunia. Sistem sosial multi-level yang dimiliki oleh SDGs memungkinkan untuk diturunkan ke level domestik suatu negara berdasarkan prioritas negara masing-masing.

## 1.5 Sintesa Pemikiran



**Gambar 1. 7** Sintesa Pemikiran

Sumber: diolah oleh penulis berdasarkan Model Konseptual Sistem Tata Kelola Global

Adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi seringkali diakibatkan oleh kondisi patriarki yang masih melekat dalam kehidupan masyarakatnya dimana peran perempuan masih dipandang sebelah mata. Hal ini kemudian menimbulkan dorongan-dorongan dari masyarakat terutama perempuan untuk mendapatkan hak-hak yang setara dengan laki-laki. Maka dari itu, terbentuklah *global governance* sebagai alat untuk menangani masalah global yang melampaui kemampuan masing-masing negara untuk menyelesaikannya. Pemerintah Jepang sebagai institusi dalam hal ini menjalin kerjasama dengan beberapa aktor negara maupun non negara untuk meningkatkan kesetaraan gendernya. Proses kerjasama penurunan angka ketidaksetaraan gender ini kemudian memunculkan *national outcomes* berupa *substantive* dan *behavioural*. *Substantive* dalam hal ini merupakan segala bentuk regulasi atau undang-undang yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Sementara *behavioural* adalah aksi atau langkah nyata yang dilakukan untuk meningkatkan angka kesetaraan gender.

## 1.6 Argumen Utama

Dalam mengupayakan peningkatan kesetaraan gendernya yang sesuai dengan prinsip SDGs dan melalui metode tata kelola struktural serta proses yang sesuai dengan standarisasi dari *global governance*, Jepang telah menjalin kerjasama dengan berbagai aktor baik negara maupun non negara dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk di dalamnya adalah UN Women dan APEC, sehingga hal ini berkaitan dengan tata kelola struktural, adapun tata kelola proses yang ingin dicapai dapat berupa adanya implementasi dan pengambilan keputusan yang bisa melalui oleh pemerintahan Jepang ataupun organisasi internasional, nasional, ataupun regional yang kemudian diaplikasikan melalui undang-undang, ataupun laporan kegiatan tertentu.

Adanya hal tersebut memberikan dampak yang berkaitan dengan *outcomes* yang dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu *substantive* dan *behavioural*. Secara substantif dapat berupa luaran komponen substantif dari peningkatan *gender equality* melalui kebijakan-kebijakan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar di Jepang, yakni pasal 14 dan pasal 24 yang membahas mengenai kesetaraan di semua sektor kehidupan. Selain itu, secara *behavioural*, Jepang telah memberikan kemudahan bagi perempuan-perempuan untuk lebih aktif di ranah publik, seperti penghapusan diskriminasi gender dalam tempat kerja, mendukung peran ayah untuk mengurus anak, dan peningkatan akses perempuan terhadap teknologi.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Pada penelitian ini penulis memilih menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Rukajat, (2018) penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistis, nyata, dan aktual, karena penelitian ini terdiri dari uraian, gambar, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan tepat tentang fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena yang dipelajari. Menggunakan metode penelitian tersebut, penulis mencoba untuk menganalisis terkait upaya Jepang dalam meningkatkan kesetaraan gender yang sesuai dengan prinsip SDGs.

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Pada penelitian ini dibutuhkan adanya jangkauan yang ditujukan untuk menjadi batasan penelitian agar menghindari adanya tumpang tindih serta bahasan yang tidak sesuai dengan fokus kerangka permasalahan penelitian yang telah ditentukan oleh penulis. Terkait batasan masalah pada penelitian ini, penulis hanya akan melakukan penelitian dengan rentang waktu mulai dari tahun 2015 hingga 2023. Pemilihan rentang waktu ini diambil karena pada tahun 2015 merupakan awal dari terbentuknya tujuan-tujuan SDGs, hingga pada tahun 2023 saat skripsi ini dibuat. Penelitian ini tidak mengadopsi konsep legitimasi dalam kerangka teori global governance oleh Cadman karena fokus utama penelitian terletak pada aspek struktur dan proses kolaborasi antar aktor dalam mendorong kesetaraan gender di Jepang. Konsep legitimasi lebih relevan digunakan dalam kajian yang menitikberatkan pada evaluasi terhadap penerimaan kebijakan oleh publik atau aktor terkait, yang dalam

penelitian ini tidak menjadi objek kajian utama.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Apabila ditinjau dari sumber data yang didapatkan penulis pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung (Sugiyono, 2017). Semua data yang penulis kumpulkan berasal dari website resmi pemerintah Jepang, jurnal penelitian, laporan tahunan oleh IGO, sumber-sumber tekstual lainnya, seperti buku, koran, majalah, atau artikel lain yang ada di internet mengenai informasi serta data data yang terkait dengan upaya Jepang dalam meningkatkan kesetaraan gender sesuai dengan prinsip SDGs.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan pada teknik analisis data kualitatif karena penulis menyusun penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman tentang fenomena yang terjadi pada subjek penelitian. Perilaku, sikap, motivasi, persepsi, dan tindakan subjek adalah semua topik yang cocok diteliti melalui teknik analisis data ini (Moleong, 2017). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data apa adanya dari perilaku orang yang dapat diamati dalam kondisi tertentu, dan hasilnya lebih menekankan makna daripada penalaran (Moleong, 2017). Sehingga penelitian ini akan menjelaskan bagaimana upaya Jepang dalam meningkatkan kesetaraan gender di negaranya sesuai dengan prinsip SDGs.

### **1.7.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini dibagi menjadi tiga bab, yaitu :

- Bab I, berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori yang berisikan konsep *gender inequality*, dan konsep *global governance*, sintesa pemikiran, argumen utama, dan metodologi penelitian yang terdiri dari lima bagian yaitu tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penelitian.
- Bab II, yang berisikan analisis interaksi antara pemerintah Jepang dengan stake holder lain untuk meningkatkan kesetaraan gender.
- Bab III, yang berupa *outcomes substantive* dan *behavioural* antara pemerintah Jepang dengan stake holder lain untuk meningkatkan kesetaraan gender.
- Bab IV, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk penelitian - penelitian selanjutnya.